

**KONTRIBUSI ELITE POLITIK DALAM MENDORONG EKSISTENSI
PERS SUNDA
(Studi Kasus Tentang Penggunaan Rubrik Pemerintahan Oleh Elite Politik
di Majalah Mangle Sebagai Saluran Informasi dan Komunikasi Publik di
Bandung)**

T a s w a r a

Program Studi Magister Ilmu Komunikasi
Pascasarjana Universitas Islam Bandung
e-mail: Mang.okka_budakhilir@yahoo.com

ABSTRACT

The emergence of local political elites who take part in politics, both executive and legislative, adding color to the development of the mass media. The mass media have a role that can not be ignored by the political elite, namely as a partner in building the “image” of politics.

Press Sunda historically an integral part of the development of mass media in Indonesia. In the era before independence dedication shown by fought against colonial peoples through the writings of the press crew. Similarly, in the era of our country's independence, the press Sunda contribute as information media as well as media that maintain and preserve the cultural heritage, especially language.

However, the emergence of the political elites in the local political level has not tasted the optimal role of the existence of the press Sunda. The contribution is less felt to be one for the press after the reform initiated Sunda. Unlike the press-language press Indonesia increasingly exists, press Sunda publication number continues to decrease. In fact, some are already bankrupt.

The focus of the research problem, how the contribution of the political elite in pushing the press Sunda existence. To explore the potential of the data the research method used was the qualitative descriptive case study. Because assessed not just mere communication aspects but also of cultural theory is used to analyze the problems faced by the press Sunda are theories critical tradition.

The research findings that support the political elite to the existence of press Sundanese existed. The support was in the form of their relationship with one another between the political elite and the press Sunda appropriate proportions and their respective roles. In addition, because it has the authority and power, both as an executive and legislative branches, political elite capable of issuing a policy that encourages the existence of Sundanese press to keep rising as the guardian and preserver of culture and local wisdom.

Keywords: Elite Politics, Sunda Press, and Culture.

A. PENDAHULUAN

Perubahan politik di Indonesia pasca bergulirnya reformasi tahun 1998, membawa dampak besar terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Tidak hanya pada aspek politik, yang ditandai perubahan pada sistem penyelenggaraan pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik, aspek lainnya seperti sosial, budaya, ekonomi dan tidak terkecuali kebijakan media massa juga menunjukkan perubahan.

Perpolitikan menunjukkan adanya peta perubahan ‘politik baru’ bagi masyarakat (dan elite) di semua level, baik nasional, regional hingga lokal. ‘Politik baru’ menggambarkan resistensi terhadap ‘politik lama’ yang otokratik, represif, dan memusat (setralisme). Interpretasi atas ‘politik baru’ – selain sebagai bentuk perlawanan – juga dipahami sebagai lahirnya polisentrisme atas konsekuensi dari desentralisasi. Polisentrisme sendiri menurut Leo Agustino dalam *Politik Lokal dan Otonomi Daerah* (2014: 75) diartikan secara sederhana sebagai perjuangan kolektif masyarakat atau daerah untuk menolak ide dan gagasan lama (atau

penguasa) yang dianggap telah melemahkan identitas dan kekuasaan mereka.

Perubahan haluan dari ‘politik lama’ yang tersentralisasi dan terkontrol kepada ‘politik baru’ yang lebih terdesentralisasi dan egaliter, membawa angin segar bagi politik lokal di Indonesia. Melalui proses demokratisasi dan desentralisasi, *local strongmen* dan bos ekonomi semakin memperoleh kesempatan untuk menjabat kursi sentral di lembaga-lembaga pemerintahan (daerah) dibanding masa-masa sebelumnya. Kalaupun mereka tidak memangku jabatan-jabatan penting, para broker ataupun para politisi lokal ini berupaya untuk memastikan bahwa para politik lokal bergantung pada bantuan dan sokongannya, dengan ‘imbalan’ adanya kebijakan resmi (yang diformulasikan) menguntungkan bisnis dan posisinya. Imbal jasa politisi kepada para broker politik tidak jarang dilandaskan pada jasa investasi politik selama berlangsungnya Pilkada atau Pemilu Kada.

Local strongmen dan bos ekonomi yang berapiliasi dengan

kekuasaan itupun kini tumbuh dan berkembang menjadi elit politik. Mosca, Gaetano sebagaimana dikutip Agustino, Leo (2014: 217) menyatakan elite politik yaitu sekumpulan kecil kelas politik yang terdiri dari individu-individu yang sebenarnya menjalankan kuasa politik dalam sebuah masyarakat.

Faktor yang tidak boleh dikesampingkan dalam perpolitikan di Indonesia pasca reformasi 1998 adalah berkembangnya praktek komunikasi politik dari para elite politik, yang ditandai penggunaan media massa sebagai saluran kepentingan politik. Komunikasi politik itu sendiri menurut Astrid S Soesanto (Sobur: 2014) sebagai berikut:

“Komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa sehingga masalah yang dibahas oleh jenis komunikasi ini, dapat mengikat semua warganyamelalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik.” (Sobur, 2014: 417).

Pers berbahasa Sunda merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan pers nasional. Kedudukan dan fungsi pers

Sunda tidak berbeda dari pers nasional yaitu sebagai media komunikasi, informasi, edukasi dan hiburan. Perbedaan mendasar hanya pada proporsi dari esensi penerbitan. Apabila pers nasional penerbitannya lebih didominasi oleh informasi mengenai persoalan umum seperti politik, ekonomi sosial, dan hiburan, sementara pers berbahasa Sunda proporsi penerbitan penekanannya pada budaya. Penonjolan proporsi informasi pada budaya ini menjadi kelebihan sekaligus kekurangan pers Sunda.

Keberadaan pers Sunda pasca reformasi digulirkan tidak seperti pers-pers yang berbahasa Indonesia yang kian eksis, tetapi jumlah penerbitannya terus berkurang. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang terbit untuk memenuhi tuntutan kebebasan pers juga kurang berpengaruh signifikan. Jumlah pers Sunda terus berkurang hingga akhirnya saat ini jumlahnya bisa dihitung dengan jari tangan.

Kondisi ini menjadi keprihatinan para pelaku dan juga pemerhati pers. Karena bila menilik kontribusi yang diberikan, pers Sunda

menyuguhkan dinamika berbeda dalam perkembangan industri penerbitan, karena menunjukkan perhatian tinggi terhadap cagar budaya etnik Sundadan nilai-nilai kearifan lokal terutama bahasa Sunda.

Ada beberapa faktor penyebab pers berbahasa Sunda terus mengalami kemunduran: *Pertama*, kurangnya sumber daya manusia dan sumber daya dana (SDM dan SDD). *Kedua*, karena tidak dikelola profesional, sehingga nasibnya terseok-seok menghadapi persaingan bisnis media. Iklan yang semestinya menjadi penyokong produksi tidak menjamin karena jumlahnya sedikit. Akibat kemunduran jumlah media pers Sunda ini tak urung menyebabkan masyarakat, terutama yang memiliki akses usaha ekonomi dan politik enggan memasang iklan.

Kemunculan elite politik lokal dengan penggunaan atribut ‘etnik’ menjadi asa bagi kebangkitan pers Sunda. Seperti apa dan bagaimana kontribusi elite politik dalam mendukung eksistensi pers Sunda itu? Adalah daya tarik tersendiri untuk mendalami masalah ini menjadi sebuah tema penelitian. Peneliti

beranggapan, saat ini belum diketahui secara empiris elite politik atau inohong Sunda mendorong eksistensi pers Sunda.

B. HASIL PENELITIAN

Eksistensi pers Sunda sangat dipengaruhi oleh bahasa Sunda sebagai pengantar interaksi dan komunikasi sebagian besar warga Jawa Barat. Bahasa Sunda menjadi suatu hal yang penting sehingga perlu diajarkan melalui media massa. Kecintaan warga Jawa Barat pada Kesundaan merupakan modal bagi para penerbit media massa cetak berbahasa Sunda.

Fungsi pers Sunda yang utama seperti pers lain yaitu menyampaikan informasi. Selain itu, manfaatnya pun dapat mempromosikan budaya asli Sunda yang ada di Jawa Barat yang sudah mulai tergerus oleh budaya lain, termasuk salah satu kearifan lokal yaitu bahasa, dalam hal ini bahasa Sunda. Dengan adanya pers Sunda yang nota bene menggunakan bahasa Sunda, maka otomatis memelihara kekayaan bahasa Sunda secara tertulis. Fungsi lain dari pers Sunda diantaranya sebagai peneras

yang mujarab dalam memajukan sastra Sunda.

Saat ini masyarakat Sunda mempunyai delapan media massa cetak yang mempergunakan bahasa Sunda, yaitu koran Galura (anak penerbitan Pikiran Rakyat), Koran Kudjang, Koran Giwangkara, Koran Mandiri, Majalah Mangle, Majalah Seni Budaya Swara Cangkurileung, Majalah Cupumanik, Majalah Suara Daerah (Intern PGRI Jabar) dan Bhineka Karya Winaya (intern KORPRI Jabar). Suara Daerah dan Bhineka Karya Winaya hanya menggunakan bahasa Sunda sebagai suplemen. Sedangkan media massa Sunda masa lalu sebagaimana dikutip dari Derap Pembangunan Pers di Jawa Barat, BPPP, 1987, orang Sunda pernah mempunyai 36 media bahasa Sunda. Dua diantaranya koran berbahasa Sunda yang terbit harian, yakni Sinar Pasoendan (1933-1942) dan Sipatahoenan (1924-1942).

Pers Sunda sebelum kemerdekaan seperti koran *Sipatahoenan*, jelas begitu peduli terhadap aspirasi masyarakat Sunda. Demikian juga setelah kemerdekaan, seperti majalah Warga yang terbit

tahun lima puluhan dan majalah Sunda yang terbit tahun enam puluhan. Tetapi, bagaimana pers Sunda sekarang seperti majalah Mangle, Sunda Mindang dan mingguan Galura?

Memang, media pers ini memuat juga hal-hal yang sedang aktual di masyarakat, tapi itu dilakukan dalam waktu-waktu tertentu. Padahal, masyarakat Sunda tentunya membutuhkan berita, laporan, eksplor tentang peristiwa atau kejadian yang sedang diperbincangkan banyak orang di berbagai bidang (ekonomi, politik, pemerintahan, lingkungan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya).

Tulisan jurnalistik dalam pers Sunda malah kian tidak tokcer, sebab tidak terasa *guligahna*. Meskipun ada tulisan yang sedikit menyerempet pada *feature*, tapi lebih mendekati gambaran profil tokoh disertai segala kesuciannya, prestasi para pejabat atau biografi instansi pemerintah dari yang palih bawah hingga yang paling tinggi. Untuk tulisan-tulisan yang kritis, tidak tajam, yang pada akhirnya terasa hambar.

Salah satu penyebab stagnasi penulisan pers Sunda ini adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang profesional, yang ada kaitannya dengan kemampuan pengusaha pers Sunda untuk membayar gaji yang layak. Terkait dengan persoalan ini, bagaimana para jurnalis Sunda bisa membuat tulisan yang berbobot bila di sisi lain ia harus memiliki profesi ganda untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti ada yang menjadi montir alat elektronik, calo, tukang kridit, atau lain sebagainya.

Pers Sunda pada masa ‘jaya’ bisa dijadikan pekerjaan yang menjanjikan bagi karyawannya, dengan capaian oplah yang besar sehingga gaji karyawan juga bisa menjadi perhatian. Misalnya, oplah Mangle pernah mencapai angka 90.000 eksemplar. Berbeda dengan sekarang, dari media Sunda yang masih bertahan seperti majalah Mangle, mingguan Galura, dan Cupumanik tirasnya mengalami penurunan. Persentasi antara bertambahnya pembaca dengan berkurangnya pembaca tidak berimbang dan saat ini rata-rata

oplahnya berada di bawah 10.000 eksemplar. Majalah yang lain sudah kehilangan pembacanya sejak lama. Majalah dan koran Sunda nampaknya berjalan dengan tertatih menemui para pembacanya dengan lesu.

C. PEMBAHASAN

1. Perhatian Elite Politik Terhadap Pers Sunda

Perubahan politik di Indonesia pasca bergulirnya reformasi tahun 1998 telah membawa dampak besar terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Sistem penyelenggaraan pemerintahan berubah dari sentralistik menjadi desentralistik. Aspek lain yang turut berubah adalah sendi-sendi kehidupan politik, sosial, budaya, ekonomi dan tidak terkecuali media massa.

Perubahan politik ditandai dengan dilaksanakannya pemilihan presiden/wakil presiden (Pilpres) dan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat. Pemilihan pilpres dan Pilkada atau Pilkada ini yang membedakan sistem politik era reformasi dengan era-era sebelumnya, yang juga disertai lahirnya para elite

politik lokal dan kebangkitan penggunaan simbol-simbol etnik.

Jones sebagaimana ditulisnya dalam *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia* menyatakan, perubahan yang dibawa oleh lembaga-lembaga selama era reformasi telah mengubah kebijakan budaya secara lebih luas dan konsisten di seluruh Nusantara. Perubahan tersebut memiliki implikasi bagi kebijakan budaya. Dalam konteks perubahan ini Jones juga melihat, elite daerah memanfaatkan identitas etnik.

Mengutip hasil pengamatan Gerry van Klinken (2001c), Jones menjelaskan, konfigurasi politik baru menunjukkan semakin menguatnya identitas etnik bagi elite-elite daerah dalam konfigurasi politik daerah, khususnya dalam persaingan mengambil alih kendali negara. Kemudian, Henley dan Davidson, serta Sakai sebagaimana dikutip Jones menyampaikan hasil penelitiannya tentang bertumbuhnya politisasi identitas etnik di berbagai lokasi di seluruh Indonesia, termasuk Jakarta (Shahab: 2001).

Perubahan pada sistem perpolitikan, tidak seluruhnya

dirasakan positif oleh media pers, terutama media lokal. Kenyataannya, media-media daerah sebut saja pers berbahasa Sunda, perubahan ini tidak banyak berpengaruh. Kesulitan makin dirasakan ketika masa-masa krisis moneter. Berbagai kegiatan usaha terasa begitu mencekik leher, sehingga pada akhirnya satu per satu dari pers berbahasa Sunda memilih mengatur penerbitan, bahkan ada pula yang memilih gulung tikar. Situasi dan kondisi ini cukup dilematis, karena kalaulah dipaksakan terbit maka biaya produksi yang mahal menyebabkan pers Sunda banyak yang merugi.

Dalam kurun waktu bersamaan, di sisi lain era ini telah menumbuhkan dinamika politik daerah dengan elite politik lokal berhasil menempati jabatan-jabatan strategis, baik yang duduk dalam eksekutif, legislatif maupun partai politik. Meski demikian, dengan fakta kemunduran pers Sunda apakah menunjukkan kurangnya perhatian elite politik terhadap pers Sunda?

Sebagaimana data informasi penelitian menunjukkan perhatian kalangan politisi partai terhadap pers

berbahasa Sunda kurang, kurang banyak. Diperkirakan jumlah pembaca koran Sunda, majalah Sunda, tidak akan mencapai 25% dari jumlah anggota DPRD. Dengan demikian, maka politisi Sunda harus selalu diingatkan dan diberikan *warning*. Mereka harus disadarkan atau dikritik agar mereka (orang Sunda) tahu supaya Sunda itu bangun, Sunda itu bangkit.

Inilah yang dimaksud kesadaran elite politik itu oleh Tjetje H. Padmadinata. Perhatian terhadap pers berbahasa Sunda sangat penting, karena mengandung komitmen terhadap pembinaan budaya Sunda, termasuk bahasa Sunda sebagai pengantar media bahasa Sunda.

Sebagai bentuk komitmen para elite politik, diusulkan agar ada kebijakan dari pemegang kekuasaan, dalam hal ini pemerintah, untuk mencegah terjadinya pers Sunda yang tidak terbit lagi atau gulung tikar. Intinya harus ada keberpihakan melalui pemaksaan. Solusi ini merupakan bentuk perhatian elite politik terhadap pers Sunda. Karenanya, patut diapresiasi sikap beberapa daerah yang menerapkan

kebijakan untuk mendorong pengembangan kebudayaan, khususnya bahasa, seperti di Kota Bandung melalui *Rebo Nyunda*. Tapi *Rebo Nyunda* itu baru tahap awal. Dalam arti hanya baju atau *cangkang*, belum menyentuh masalah-masalah substansial.

Rebo Nyunda itu tidak hanya baju, tetapi yang terkait dengan masalah perilaku, masalah sikap. Bila kondisi ini dibiarkan seperti saat ini dampaknya juga akan dirasakan pers Sunda, sehingga jangankan *survive* untuk bangkit saja akan sulit.

Kajian penelitian ini menjelaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pers Sunda bisa *survive*. Paling utama tentu harus ada kesadaran dari masyarakat sebagai pemangku budaya lokalnya, budaya daerahnya. Masyarakat agar punya tanggung jawab bahwa budaya lokal itu, pers itu adalah miliknya yang harus secara serius dikembangkan melalui kesadaran dari awal, yaitu dari pranata keluarga. Ini sudah harus ditanamkan, betapa pentingnya memiliki sebuah mass media yang berbasis budaya daerah, budaya lokal. Dengan demikian, nanti yang terkait

dengan bahasa Sunda yang merupakan ciri dasar entitas itu tidak sirna.

Kemunduran yang sangat drastis dari pers Sunda di antaranya karena arus globalisasi, dimana masyarakat Sunda, terutama generasi muda, tidak lagi hirau dengan bahasa ibunya. Globalisasi itu atau yang terkait dengan budaya itu termasuk pers yang berbahasa Sunda, itukan nilai-nilai lokal. Nilai-nilai lokal itu sampai saat ini tidak kuat. Kalau ini tidak kuat atau lemah resikonya, adalah yang kuat seperti budaya global itu mempengaruhi lokalitas. Budaya-budaya lokal lemah. Itu alasan penyebabnya, karena pers Sunda tidak menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sendiri. Sementara masyarakat berubah persepsi, berubah kebutuhan yang lebih mengglobal seperti saat ini.

Berkurangnya jumlah penerbitan pers Sunda berpengaruh pada peranan dan fungsi pers Sunda. Selama ini pers Sunda berperan dan berfungsi memelihara dan mengembangkan kebudayaan Sunda, khususnya bahasa. Pengaruh itu sangat besar meskipun isinya sangat

umum. Isinya bukan hanya kebudayaan, tetapi ada juga hiburan dan informasi. Karena menggunakan bahasa Sunda jadi, mereka (pembaca) itu berusaha menggunakan bahasa Sunda yang baik dan benar.

Orang-orang Sunda yang memiliki kekuasaan perhatiannya terhadap pers Sunda mulai ada. Tapi mereka tidak mengetahui langkah apa yang harus dilakukan, baru sebatas berteriak, “saya itu orang Sunda, saya itu harus hebat”. Perhatian ini (muncul) terutama bila dikaitkan dengan Pemilu. Kalau musim pemilu pasti mereka (elite politik) menggunakan media massa, termasuk media lokal untuk kepentingan kampanye.

Untuk kepentingan ini biasanya media pers memberikan ruang, terutama untuk kampanye seperti dialog terbuka, dialog publik, dialog khusus para calon. Dengan fakta ini elite politik ini secara eksplisit bukan untuk memajukan pers Sunda, tetapi untuk kepentingan elite politik itu sendiri.

Diakui Rachmiate dan Suryadi (2009), terkait hal ini media tidak dapat dipisahkan dari kepentingan

ekonomi dan politik yang ada di baliknya, terutama dapat membentuk isi media, informasi yang disajikan dan makna yang ditawarkan. Akibatnya media tidak dapat netral, jujur, adil, objektif dan terbuka (Yasraf A Piliang, 2005). Media menjelma menjadi kepanjangan tangan penguasa dengan menguasai ruang publik.

2. Hubungan Elite Politik dengan Pers Sunda

Elite politik sangat mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat untuk masyarakat banyak. Dengan demikian, komunikasi elite politik perlu mendapat perhatian, karena sangat berpengaruh pada penyampaian pesan kepada masyarakat. Selain itu, elite politik harus mampu membina hubungan yang harmonis dan dinamis dengan kelompok massa. Dengan hubungan yang harmonis dan dinamis ini, maka komunikasi antara elite politik dengan khalayak (rakyat) dapat berjalan lancar dan kebijakan yang akan dikeluarkan elite politik tidak akan merugikan masyarakat (rakyat).

Dalam kaitannya dengan kedudukan ini, elite politik berada

pada posisi strategis untuk memainkan peran politik dalam suatu *setting* politik. Nimmo sebagaimana dikutip Mulyana (2014: 30), politisi (elite politik) sebagai komunikator politik memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam proses pembentukan opini publik. Politisi atau politikus berkomunikasi sebagai wakil suatu kelompok dan pesan-pesan politikus itu adalah untuk mengajukan dan atau melindungi tujuan kepentingan politik. Artinya, komunikator politik mewakili kepentingan kelompok, sehingga jika dirangkum maka politikus mencari pengaruh lewat komunikasi.

Membangun hubungan baik antara elite politik dan media massa juga tidak bisa lepas dari penggunaan bahasa. Hasil penelitian Momon Sudarma (2014: 216) menunjukkan bahwa bahasa dalam konteks politik merupakan wacana penting dan banyak menarik perhatian. Bahasa politik sebagaimana yang banyak terungkap dalam retorika elite, maupun yang tertuang dalam media massa, memberikan gambaran mengenai pandangan dunia atau

ideologi politik dari para si penuturnya sendiri.

Kemudian Momon Sudarma menambahkan, bahasa politik dengan “bahasa media” memiliki peran nyata, baik itu menciptakan realitas, menggeser realitas atau mengganti realitas. Realitas yang tercipta adalah realitas bahasa politik, atau “citra” yang terbentuk.

Pers Sunda dalam realitas sejarah penerbitan regional maupun nasional telah memberikan warna yang sangat berarti terhadap kehidupan budaya masyarakat Sunda. Peranan dan fungsi pers Sunda dapat membangun karakter Sunda. Setidaknya membangun karakter Sunda itu maksudnya orang Sunda mau kemana dan kemajuan orang Sunda sampai dimana, ada dalam pers Sunda.

Hubungan antara elite politik dengan pers Sunda merupakan wujud kepedulian elite politik untuk mendorong eksistensi pers Sunda. Namun kepedulian ini harus disertai upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia dari pengelolanya, termasuk wartawan-wartawannya harus ditingkatkan. Selain itu,

masyarakat juga harus mewajibkan diri dengan menekankan diri, bahwa mereka baru adil apabila mereka membaca koran atau majalah bahasa Indonesia sekaligus pula membaca media bahasa daerah. Dengan demikian, elite politik harus dapat mendorong kesadaran masyarakat. Tidak penting asalnya dari mana, Aceh, Jawa, Minang, yang paling penting harus hapal *purwawiwitan*, *purwadaksinya*, atau asal-usul.

Hubungan antara elite politik dengan pers Sunda harus diwujudkan dengan itikad dari semua orang Sunda untuk berani maju dan berperan. Arti maju itu tidak terbatas hanya bekerja dan berusaha, tetapi harus bisa berperan lebih nyata sehingga persnya pun dapat berperan. Upaya nyatanya harus mampu mendorong berlangganan dan minimal Ia (elite politik) juga harus membaca karya-karya pers Sunda. Minimal dan maksimal turut memajukan, lebih maksimal lagi berjuang bagaimana agar pers lebih terhormat di kalangan nasional.

Di samping ada yang aktif mendorong keberadaan pers Sunda, adapula di antara mereka (elite

politik) beranggapan pers Sunda tidak memiliki nilai dan manfaat bagi kepentingan politik. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan, sehingga yang paling besar andilnya terkait dengan masalah hancurnya pers Sunda adalah para elite politik.

Karenanya, seharusnya mereka (elite politik) memikirkan regulasi agar pemeliharaan kebudayaan, khususnya bahasa itu *puguh* regulasinya, masyarakat menggunakan bahasa itu punya pegangan. Saat ini kan tidak ada regulasi seperti itu, hanya ada himbauan saja dari pemerintah, bahkan dari lembaga PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) juga hanya berupa himbauan saja untuk kembali ke bahasa Ibu.

Tentunya, dengan fungsi legislator ini yang terpenting ada kemauan untuk membuat undang-undang atau aturan. Tugas mereka itu adalah legislator, membuat undang-undang, aturan. Hendaknya produktif dalam membuat undang-undang yang mengarah pada pelestarian bukan hanya bahasa, tetapi kebudayaan secara umum.

Kemudian, mereka (elite politik) harus terjun juga ke lapangan, setidaknya mendorong orang-orang di sekitarnya menjadi pelanggan media Sunda. Kalau saja anggota dewan (DPRD) itu jumlahnya 50-100 orang, selanjutnya PNS-nya setiap daerah ada 100 orang yang berlangganan sudah lumayan, 33 x 100 eksemplar berarti 33 ribu itu bisa sebaiknya berlangganan koran berbahasa Sunda.

3. Alasan Elite Politik Memberikan Perhatian Pada Pers Sunda

Perubahan pada sistem pemilihan kepala negara maupun kepala daerah secara langsung pasca perubahan politik reformasi, berdampak pula pada perkembangan media penerbitan pers. Mulai dari pers yang mempunyai idealisme tinggi terhadap realitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara sampai pada media penerbitan pers dadakan, yang diterbitkan secara khusus untuk menyokong proses Pemilu maupun Pemilukada. Bahkan melalui pemberitaan media pers yang masif, telah mendorong tampilnya pigur-pigur calon pemimpin menghiasi halaman depan majalah atau pun surat

kabar, dari mulai yang dikenal oleh masyarakat hingga pigur-pigur sama sekali belum dikenal oleh masyarakat.

Fakta lapangan, baik pers maupun elite politik sama-sama saling membutuhkan satu sama lain. Di satu sisi media pers ingin meraup keuntungan atau paling tidak dapat menambah untuk biaya produksi penerbitan. Di sisi lain, elite politik tertolong untuk diperkenalkan kepada khalayak masyarakat calon pemilihnya pada proses Pemilu ataupun Pemilukada. Wiliam L. Rivers-Jay W. Jensen dan Theodore Peterson dalam *Media Massa & Masyarakat Modern* (2003: 255) mengungkap alasan penggunaan media sebagai berikut:

“Media bukan saja menjadi pembujuk kuat, namun media juga bisa membelokan pola perilaku atau sikap-sikap yang ada terhadap suatu hal. Kemudian, mereka juga menambahkan, medialah yang mendorong konsumen untuk memilih suatu produk tertentu dengan meninggalkan produk lain, atau untuk berganti merk” (Rivers- Jensen-Peterson, 2003: 255).

Elite politik beralasan memanfaatkan media massa (termasuk pers Sunda) ini karena peranan dan fungsi pers itu sendiri.

Pers Sunda memiliki peran penting di tengah masyarakat, antara lain: *Pertama*, minimal dengan memberi perhatian terhadap pers Sunda ini dapat mengetahui kebutuhan orang Sunda itu sampai dimana. *Kedua*, bisa mengerti orang Sunda itu sampai dimana kemajuannya. *Ketiga*, pemikiran orang Sunda itu mau kemana. *Keempat*, kira-kira bagaimana hubungan orang Sunda dengan etnis lainnya, terutama dengan orang Jawa yang boleh dibilang saat ini memegang peranan penting dalam tampuk pemerintahan di Indonesia.

Di samping itu, elite politik itu butuh karya pers. Dalam kaitan ini, tidak jarang ada di antara mereka yang secara sadar turut mendukung operasional dari pers Sunda, bahkan turut terlibat dalam pengelolaan perusahaan penerbitan pers. Ia betul-betul merasa terpanggil, yang dinilainya merupakan bagian idealisme untuk menjaga, memelihara dan mengembangkan kebudayaan Sunda, terutama bahasa. Di luar itu, alasan lainnya adalah bisa saja untuk meraih simpatik masyarakat Sunda.

Empati elite politik terhadap pers Sunda itu harus menjadi kewajiban untuk menjaga dan memelihara pers Sunda. Karena pers Sunda yang paling efektif sebagai saluran informasi untuk menjaga kelestarian nilai-nilai Kesundaan dan sebagai dasar entitas itu bahasa. Bahasa harus benar-benar menjadi bagian dari kehidupan orang Sunda.

4. Penggunaan Rubrik Pemerintahan di Majalah Mangle Berkaitan Dengan Profesi Elite Politik

Pemerintah dan media pers serta pemerintah dan masyarakat saling bergantung antara satu sama lain. Pers dan masyarakat pun demikian. Pers mustahil hidup dan berkembang di suatu wilayah tanpa ada pemerintah dan masyarakatnya. Secara sederhana dapat dilihat bahwa berbagai program-program pemerintah adalah fakta sosial yang selalu memiliki nilai berita (*news value*). Apapun yang dikerjakan pemerintah dan bagaimana kinerjanya (baik ataupun buruk), dapat diberitakan oleh media massa. Hal ini karena pemerintah adalah institusi pelayan publik, sehingga masyarakat

sebagai *user*-nya selalu membutuhkan informasi tentang pemerintahan.

Sebagai lembaga sosial, pers menjadi jembatan yang menghubungkan kepentingan pemerintah dan masyarakat secara timbal balik. Hubungan pemerintah, masyarakat dan media pers digambarkan oleh Djuroto (2000: 5) bahwa pers sebagai lembaga, intensitasnya berdiri sendiri. Ia hidup di tengah-tengah masyarakat, tetapi bukan bagian dari masyarakat itu. Ia berada dalam satu negara, tetapi bukan bagian dari pemerintahan negara tersebut.

Pers lebih dikenal sebagai “lembaga Kemasyarakatan” (*social institution*). Hubungan ketiganya saling mempengaruhi. Pers mempengaruhi masyarakat, tetapi masyarakat juga berpengaruh pada pers. Pers mempengaruhi pemerintah, namun pemerintah juga berpengaruh terhadap pers.

Pers Sunda, khususnya majalah Mangle, esensi pemberitaannya sangat bergantung dan memperhatikan pada segmen pasar atau masyarakat pembacanya. Pembaca majalah Mangle adalah

masyarakat Sunda. Karenanya Mangle menjadi bahan bacaan keluarga, mulai dari kanak-kanak hingga kalangan orang dewasa.

Isi media tentunya sudah berdasarkan pertimbangan, seperti cerita fiksi yang membuat orang bisa menunda dahulu untuk membacanya karena fiksi tahan lama. Namun dari sisi pemasaran kurang daya tarik. Karenanya, Mangle sekarang sudah ada muatan-muatan aktual yang mungkin dianggap perlu oleh pembaca untuk melihat informasi lingkup Kesundaan dan dunia luar dilihat dari sudut pandang orang Sunda.

Berkaitan dengan esensi media ini, ada di antaranya yang merupakan kepentingan informasi suatu lembaga dari setiap penerbitan majalah Mangle. Misalnya Paguyuban Pasundan, karena setiap penerbitan Mangle terdapat tofik *Aweuhan Pasundan*. Pada rubrik ini dapat melihat dan tergambar bagaimana peran dan perkembangan Paguyuban Pasundan berkiprah dalam masyarakat *Kasundaan*.

Upaya yang sama juga dilakukan dengan lembaga dan

organisasi lainnya, seperti dengan Universitas Padjadjaran. Kerja sama dengan UNPAD diperkuat melalui perjanjian kerjasama (MOU). Dari kerjasama ini di Mangle memberi ruang dengan adanya rubrik *Balebat Padjadjaran*. Bentuknya ada tulisan-tulisan di Mangle yang perlu untuk disebarkan kepada masyarakat mengenai hasil penelitian, yang selama ini oleh pembaca Mangle dan masyarakat Jawa Barat belum diketahui mengenai hasil-hasil penelitian para dosen UNPAD.

5. Manfaat Yang Dapat Dipetik Elite Politik Dari Rubrik Majalah Mangle

Fungsi pers Sunda yang utama seperti pers lain yaitu menyampaikan informasi. Selain itu, manfaatnya pun dapat mempromosikan budaya asli Sunda yang ada di Jawa Barat yang sudah mulai tergerus oleh budaya lain, termasuk salah satu kearifan lokal yaitu bahasa, dalam hal ini bahasa Sunda. Dengan adanya pers Sunda yang nota bene menggunakan bahasa Sunda, maka otomatis memelihara kekayaan bahasa Sunda secara tertulis. Fungsi lain dari pers Sunda diantaranya sebagai peneras

yang mujarab dalam memajukan sastra Sunda.

Meskipun dalam rubrik-rubrik majalah Mangle lebih banyak informasi mengenai budaya, bukan berarti perhatian terhadap perkembangan politik lokal, regional dan nasional menjadi tertutup. Secara politik, orang Sunda itu sangat berpotensi untuk dukungan politik, sebab jumlah orang Sunda kedua setelah orang Jawa. Jadi masyarakat Sunda itu sangat potensial, sehingga apabila elite politik hapal dengan keinginan masyarakat Sunda maka setidak-tidaknya dia dapat berperan untuk kemajuan dirinya dan partainya.

Menyikapi kondisi demikian, Mangle peduli terhadap kehidupan politik, baik lokal, regional maupun nasional, dengan menyajikan rubrik tamu yang secara konsisten ada setiap kali penerbitan. Rubrik ini disajikan untuk mengorbitkan calon-calon pemimpin dari Sunda. Ingat pesan Wilburn Scramm sebagaimana dikutip Antar Venus dalam Manajemen Kampanye (2012: 84), bahwa saluran sebagai perantara apapun yang memungkinkan pesan-

pesan sampai kepada penerima. Masih dalam buku yang sama, Antar Venus menyatakan, sebagai saluran penyebaran informasi, media massa juga memiliki kemampuan untuk mempersuasi khalayak.

Mangle ingin menjawab tantangan dinamika politik yang berkembang di tanah air. Dalam kaitan ini media Sunda, khususnya Mangle, meposisiikan diri seperti media pada umumnya untuk melahirkan *inohong-inohong* atau pigur-pigur pemimpin. Bagaimana caranya, di antaranya dengan mengundang mereka untuk berbicara di Mangle, *memangung* mereka dengan gagasan-gagasannya, baik mereka sebagai pemimpin formal maupun in formal, atau cikal bakal sebagai pemimpin.

Pemanfaatan rubrik pada majalah Mangle oleh elite politik juga akan tumbuh subur manakala musim pemilu. Pasti mereka menggunakan media massa, termasuk media lokal, untuk kepentingan kampanye. Untuk hal ini media pers memberikan ruang, seperti dialog terbuka, dialog publik, dialog khusus para calon.

D. SIMPULAN

Perhatian elite politik terhadap eksistensi pers berbahasa Sunda itu sudah ada dan mulai dirasakan oleh media pers Sunda. Dukungan dan dorongan yang dapat dirasakan adanya upaya agar pers berbahasa Sunda tetap eksis, mulai dari keterlibatan elite politik untuk diminta sebagai nara sumber, mendorong dengan berbagai kebijakan seperti berlangganan maupun menerbitkan regulasi.

Selain perhatian, elite politik dengan pers Sunda telah memiliki hubungan positif sebagai mitra untuk saling mendukung sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Wujud saling mendukung itu dilakukan dengan adanya kebijakan elite politik mendorong pengembangan oplah berlangganan, kesediaan sebagai nara sumber, sedangkan media memberikan kesempatan dengan memuat rubrik-rubrik pembangunan, pemerintahan dan politik, termasuk di dalamnya penayangan iklan.

Alasan elite politik memberikan perhatian dan membangun hubungan dengan pers Sunda ini adalah *pertama*, karena kepentingan elite

politik untuk menyerap aspirasi masyarakat. *Kedua*, karena peranan dan fungsi pers Sunda sebagai saluran informasi dan komunikasi publik kaitan dengan kiprah para elite pada panggung politik. *Ketiga*, untuk mendukung inisiatifnya mendukung pengembangan dan pelestarian budaya Sunda dan nilai-nilai lokal. *Keempat*, untuk menunjukan kewajibannya sebagai pemangku kepentingan dan pemegang kebijakan yang diwujudkan sebagai legislator peraturan perundang-undangan.

Selain alasan di atas, perhatian elite politik ini karena manfaat yang dapat dipetik dari rubrik pers Sunda (*Mangle*), yakni sebagai informasi pemetaan yang terkait budaya Sunda, memupuk tanggung jawab bersama dan membangun kesadaran sebagai orang Sunda, serta untuk kepentingan kampanye politik pada saat pesta demokrasi seperti Pemilu, Pilpres dan Pilkada.

E. SARAN

Secara akademis, dalam penelitian ini mungkin yang dilakukan masih dalam tahap yang makro belum pada penelitian yang

lebih mikro, sehingga ke depan perlu ada penelitian tentang perhatian elite politik yang lebih spesifik seperti regulasi, keterlibatan elite politik dalam media pers Sunda, pemanfaatan media bagi kepentingan komunikasi politik, ekonomi media dan lain sebagainya.

Kajian penelitian ini menarik untuk didalami, karena di satu sisi secara teoritis media pers harus bersikap independen namun di sisi lain pers Sunda membutuhkan perhatian semua pihak terutama elite Sunda yang dapat menyebabkan independensi media terintervensi oleh kepentingan elite politik. Lantas bagaimana keterlibatan elite politik dan independensi pers berbahasa Sunda? Hal inilah yang menurut peneliti perlu kajian mendalam sebagai bahan dalam pengembangan keilmuan ke depan.

Saran praktisnya, ke depan mengenai isi media pers Sunda, terutama kaitan dengan pemerintahan, harus dipertimbangkan tulisan-tulisan dengan isu yang segar, eksklusif dan ditulis dengan teknik yang tepat untuk menggali informasi lebih mendalam,

sehingga hal ini bisa menarik khalayak pembaca.

Kaitannya dengan era demokratisasi seperti sekarang, tentu menjadi hal yang lumrah apabila suatu media terlibat pula dalam mengembangkan pesan komunikasi politik. Apalagi adanya keinginan-keinginan *inohong* Sunda akan lahirnya “pemimpin asal Sunda”. Keinginan ini harus bisa ditangkap oleh majalah Mangle. Bila dulu mungkin majalah Mangle hanya meminta elite politik sebagai narasumber dalam sebuah rubrik, maka ke depan harus mulai dipikirkan untuk didaulat sebagai narasumber dalam suatu seminar dengan menghadirkan tokoh-tokoh yang berpotensi jadi pemimpin nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2014, *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, Alfabeta, Bandung.
- Djuroto, Totok, 2000, *Manajemen Penerbitan Pers*, Remaja Rosdakarya, PT., Bandung.
- Hasandinata, Neti Sumiati, 2015, *Pers Berbahasa Sunda Dari Masa Ke Masa*, Granesia, Bandung.

- Jones, Tod, 2015, *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia Kebijakan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Littlejohn, Stephen W. & Foss, Karen A, 2009, *Teori Komunikasi (Theories of Human Communication)*, Salemba Humanika, Jakarta Selatan.
- Mulyana, Deddy, 2014, *Komunikasi Politik-Politik Komunikasi*, Remaja Rosdakarya, PT, Bandung.
- Rachmiate, Atie & Suryadi, Karim, 2009, *Sistem & Kebijakan Komunikasi Penyiaran di Indoensia*, Anugrah, CV., Bandung.
- Rivers, William J. – Jensen, Jay W. – Peterson, Theodore, 2003, *Media Massa & Masyarakat Modern*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sobur, Alex, 2014, *Ensiklopedia Komunikasi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Sudarma, Momon, 2013, *Antropologi Untuk Budaya*, Mitra Wacana Media, Bandung.
- Venus, Antar, 2012, *Manajemen Kampanye*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Yin, Robert K, 2014, *Studi Kasus Desain & Metode*, Raja Grafindo Persada, PT., Jakarta.
- Kartadibrata, Karno, Edisi No. 2496, 15 Oktober 2014, *Pers Sunda Ideologis*, Majalah Mangle, Bandung.
- https://id.wikipedia.org/wiki/rebo_nyunda